



Nasionalisme Inklusif Berbasis Pancasila dan Relevansinya dengan Sejarah Nasional Indonesia dalam Menjawab Tantangan Multikulturalisme

Maria Lidia Elsiani Meo

Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: elsyмео5@gmail.com

Anjulin Yonathan Kamlasi*

Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: anjulin.kamlasi@staf.undana.ac.id

Jusuf Ariyanto Amheka

Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: ariyanto.j@staf.undana.ac.id

Aulya Ratnasari

Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: sariaulia@gmail.com

Damianus Wolu Maru

Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: damianuswolumaru@gmail.com

Nobertus Deni Cuan

Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: denicuan8@gmail.com

Oksix Godlavson Rutin Tari

Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: elsyмео5@gmail.com

**Corresponding Author*

Article History

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| Submitted | : 2026-04-29 | Accepted | : 2026-06-02 |
| Revised | : 2026-05-26 | Published | : 2026-06-18 |

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v10i1.10725>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep nasionalisme inklusif yang berlandaskan Pancasila serta keterkaitannya dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam menghadapi isu-isu multikulturalisme masa kini. Pendekatan yang digunakan adalah kajian kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber akademik, arsip historis, dan dokumen normatif yang relevan dengan tema nasionalisme, Pancasila, dan dinamika sosial di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa nasionalisme inklusif merupakan wujud kesadaran berbangsa yang tidak menyangkal keberagaman, melainkan menyatukannya sebagai potensi kolektif. Pancasila berperan sebagai landasan normatif yang mampu mengakomodasi pluralitas melalui prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Rekam jejak sejarah bangsa, khususnya dinamika perjuangan kemerdekaan dan peristiwa Sumpah Pemuda 1928, menunjukkan bahwa semangat inklusivitas telah melekat dalam karakter nasionalisme Indonesia sejak masa pembentukannya. Konteks modern memperlihatkan bahwa tantangan multikulturalisme seperti konflik identitas, intoleransi, kesenjangan sosial, serta dampak globalisasi dan digitalisasi menuntut penguatan kembali nilai-nilai Pancasila secara kontekstual. Nasionalisme inklusif hadir sebagai paradigma alternatif yang menekankan dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan berperan strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan kritis dan multikultural. Integrasi antara nilai historis dan ideologis menjadi kunci dalam membangun identitas nasional yang



adaptif sekaligus berakar kuat. Disimpulkan bahwa nasionalisme inklusif berbasis Pancasila, yang diperkuat oleh kesadaran sejarah, merupakan instrumen esensial dalam menjaga kohesi sosial dan merespons kompleksitas multikulturalisme Indonesia secara berkelanjutan dan transformatif.

Kata Kunci: Nasionalisme, Inklusif, Pancasila, Multikulturalisme, Sejarah Nasional, Keberagaman

Abstract

This study aims to examine the concept of inclusive nationalism grounded in Pancasila and its connection to the historical journey of the Indonesian nation in addressing contemporary issues of multiculturalism. The approach employed is a literature review, analyzing various academic sources, historical archives, and normative documents relevant to the themes of nationalism, Pancasila, and social dynamics in Indonesia. The research findings reveal that inclusive nationalism is a form of national consciousness that does not deny diversity but rather unites it as a collective potential. Pancasila serves as a normative foundation capable of accommodating plurality through the principles of humanity, unity, democracy, and social justice. The nation's historical record, particularly the dynamics of the independence struggle and the 1928 Youth Pledge event, demonstrates that the spirit of inclusivity has been ingrained in the character of Indonesian nationalism since its formative period. The modern context reveals that the challenges of multiculturalism such as identity conflicts, intolerance, social inequality, and the impacts of globalization and digitalization demand a contextual reinvigoration of Pancasila's values. Inclusive nationalism emerges as an alternative paradigm that emphasizes dialogue, tolerance, and respect for human rights. Education plays a strategic role in internalizing these values through reflective and multicultural approaches. The integration of historical and ideological values is key to building a national identity that is both adaptable and deeply rooted. It is concluded that inclusive nationalism based on Pancasila, reinforced by historical awareness, is an essential instrument in maintaining social cohesion and responding to the complexities of Indonesian multiculturalism in a sustainable and transformative manner

Keyword: Nationalism, Inclusivity, Pancasila, Multiculturalism, National History, Diversity

PENDAHULUAN

Nasionalisme yang inklusif berdasarkan Pancasila menjadi salah satu ide utama dalam menghadapi keragaman yang ada di Indonesia. Keberagaman sosial di tanah air yang multikultural, terdiri dari berbagai etnis, agama, bahasa, dan kebudayaan, memerlukan pendekatan nasionalisme yang tidak bersifat eksklusif, tetapi mampu mengakomodasi setiap perbedaan sebagai kekuatan bersama. Pancasila sebagai landasan negara memberikan nilai-nilai mendasar seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang sangat relevan untuk mengembangkan nasionalisme yang inklusif dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (Latif 2022). Sejarah negara Indonesia menunjukkan bahwa semangat kesatuan telah menjadi dasar utama sejak periode perjuangan untuk merdeka. Sumpah Pemuda yang diambil pada tahun 1928 menggambarkan tekad kolektif untuk melebihi identitas lokal demi satu identitas nasional yang lebih menyeluruh. Nilai ini menandakan bahwa nasionalisme di Indonesia sejak awal memiliki elemen inklusivitas, di mana keberagaman tidak dihilangkan, melainkan disatukan dalam satu tujuan yang sama (Anwar 2021).

Konsep nasionalisme yang bersifat inklusif yang didasarkan pada Pancasila tidak hanya berfokus pada persatuan, tetapi juga pada penghormatan terhadap perbedaan yang merupakan bagian dari karakter bangsa. Tantangan dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mempercepat pertukaran budaya, sehingga kemungkinan timbulnya konflik yang berakar dari identitas juga semakin besar. Situasi ini memerlukan penguatan nilai-nilai Pancasila agar tetap memiliki relevansi dalam memelihara keharmonisan sosial (Sutrisno and Prasetyo, 2023).

Multikulturalisme sebagai fakta sosial menawarkan kemungkinan serta hambatan bagi negara Indonesia. Keanekaragaman dapat menjadi aset budaya yang berharga, namun juga dapat memicu perselisihan jika tidak ditangani dengan tepat. Nasionalisme inklusif yang berlandaskan Pancasila muncul sebagai jawaban untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu dengan menggunakan cara yang menekankan toleransi, komunikasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Hidayat 2024).

Relevansi sejarah bangsa dalam situasi ini terletak pada prinsip-prinsip perjuangan yang menekankan persatuan di atas kepentingan kelompok. Para perintis negara telah membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia dihasilkan bukan hanya oleh satu kelompok, tetapi merupakan upaya bersama dari berbagai elemen dalam masyarakat. Semangat ini menjadi dasar yang signifikan dalam menciptakan nasionalisme yang inklusif (Rahmawati 2022). Pendidikan memiliki fungsi kunci dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang inklusif dan berlandaskan pada Pancasila. Proses pembelajaran bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk kepribadian siswa agar dapat berinteraksi dalam masyarakat yang beragam. Metode pengajaran yang relevan dan berfokus pada manusia dapat memfasilitasi siswa untuk menyadari betapa pentingnya menghargai perbedaan (Nurgiansah, 2021)

Perkembangan sosial dan politik saat ini menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya pemisahan identitas di berbagai lapisan masyarakat. Kejadian ini mengisyaratkan bahwa nilai-nilai kebersamaan harus senantiasa dikuatkan agar tidak terganggu oleh kepentingan yang sempit. Nasionalisme yang inklusif dan berlandaskan Pancasila berperan penting dalam memelihara ikatan sosial ketika menghadapi tantangan-tantangan tersebut (Wibowo and Santoso 2025). Penguatan nasionalisme yang bersifat inklusif juga sangat terkait dengan usaha menciptakan keadilan sosial. Ketidakadilan ekonomi dan sosial bisa menimbulkan rasa tidak puas yang dapat mengancam persatuan di tingkat nasional. Prinsip keadilan yang ada dalam Pancasila memberikan pedoman bagi kebijakan publik untuk mampu menghadirkan kesejahteraan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia (Prabowo 2023).

Integrasi antara nilai sejarah dan nilai ideologi merupakan faktor penting dalam mempertahankan kesinambungan nasionalisme Indonesia. Sejarah menyuguhkan pembelajaran mengenai signifikansi persatuan, sedangkan Pancasila menawarkan panduan normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya berfungsi saling mendukung dalam menciptakan identitas nasional yang kokoh dan inklusif (Kusuma 2022). Kajian mengenai nasionalisme yang inklusif dengan landasan Pancasila serta hubungannya dengan sejarah bangsa kini semakin krusial di tengah rintangan multikulturalisme yang rumit. Pemahaman yang menyeluruh terhadap nilai-nilai ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama

masyarakat Indonesia dalam melestarikan persatuan di tengah perbedaan dan menciptakan masa depan yang adil dan harmonis bagi bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian kepustakaan dipilih karena tujuan utamanya adalah menelaah, menginterpretasikan, dan mensintesis gagasan konseptual yang terdokumentasi dalam berbagai sumber ilmiah mengenai nasionalisme inklusif, Pancasila, dan multikulturalisme dalam konteks sejarah nasional Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan mencakup dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, analisis isi (*content analysis*) diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tema-tema sentral dari sumber-sumber yang dikaji, mencakup pengkodean tematik secara induktif terhadap konsep-konsep kunci, kategorisasi ke dalam kluster konseptual utama, serta interpretasi hubungan antartema secara sistematis. Kedua, analisis diskursus (*discourse analysis*) digunakan untuk mengkaji bagaimana wacana nasionalisme berbasis Pancasila dikonstruksikan dalam teks akademik dan dokumen kebijakan, termasuk konteks historis yang membentuknya. Proses seleksi sumber literatur dilakukan secara terstruktur dengan kriteria inklusi yang meliputi: publikasi dalam rentang 2000–2024 (dengan pengecualian karya klasik yang memiliki signifikansi historis), sumber dari jurnal terindeks (Scopus, SINTA, DOAJ), buku akademik bereputasi, serta dokumen resmi negara yang relevan. Sumber yang tidak melalui proses penelaahan sejawat (*peer-review*) dikecualikan. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, Portal Garuda, dan Scopus menggunakan kata kunci seperti “Pancasila dan nasionalisme,” “nasionalisme inklusif Indonesia,” dan “multikulturalisme kebangsaan.” Validitas temuan dijamin melalui triangulasi sumber, yakni memverifikasi setiap klaim konseptual dari minimal tiga sumber yang saling independen. Sumber literatur yang relevan (Sugama et al. 2024). Kajian ini berfokus pada Konsep Nasionalisme Inklusif Berbasis Pancasila dalam Konteks Keberagaman Indonesia, Relevansi Sejarah Nasional Indonesia dalam Membentuk Nasionalisme Inklusif, Serta Peran Nasionalisme Inklusif dalam Menjawab Tantangan Multikulturalisme di Era Modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nasionalisme Inklusif Berbasis Pancasila dalam Konteks Keberagaman Indonesia

Kerangka kerja nasionalisme inklusif berbasis Pancasila dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga komponen yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah **Fondasi Nilai**, yaitu Pancasila sebagai sumber normatif yang mengandung prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Komponen kedua adalah **Fondasi Historis**, yakni

pengalaman kolektif perjuangan kemerdekaan dan Sumpah Pemuda 1928 yang membuktikan inklusivitas sebagai karakter asli bangsa Indonesia. Komponen ketiga adalah **Respons Kontemporer**, berupa strategi penguatan melalui pendidikan multikultural, dialog antarkelompok, dan internalisasi nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan konflik identitas, intoleransi, dan pengaruh globalisasi. Ketiga komponen ini berinteraksi secara sinergis: nilai-nilai Pancasila menjadi landasan, sejarah nasional menjadi legitimasi, dan pendidikan serta kebijakan publik menjadi instrumen operasionalnya dalam membangun kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Secara etimologis kata Nasionalisme, akar katanya *national* yang diambil dari *natio* yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata *natio* berasal kata *nascie* yang berarti dilahirkan. *Nation* atau bangsa menurut Hans Kohn adalah golongan-golongan yang beragam dan tidak dapat dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lainnya, seperti kesamaan keturunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat, tradisi, perasaan dan agama. Akan tetapi tidak satupun diantara faktor-faktor itu bersifat mutlak guna merumuskan bentuk dasar sebuah bangsa. Nasionalisme Menurut Hans Kohn adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sebelum lahirnya nasionalisme, kesetiaan orang tidak ditunjukkan kepada negara bangsa tetapi ditujukan kepada berbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja, kesatuan ideologi seperti suku, negara kota, Kerajaan dinasti atau gereja. Hal yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Sartono Kartodirjo. Menurutnya nasionalisme adalah ideologi yang mencakup lima prinsip yaitu *unity* (kesatuan) yang merupakan syarat yang tidak bias ditolak, *liberty* (kemerdekaan) termasuk kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat, *equality* (persamaan) bagi setiap warga untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing, *personality* (kepribadian) yang terbentuk oleh pengalaman budaya dan sejarah bangsa, dan performance dalam arti kualitas atau prestasi yang dibandingkan kepada bangsa lain (Aminuddin and Nasution 2025).

Menurut Ensiklopedi Indonesia Nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dan dengan demikian merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa. Dengan demikian kata kunci dalam nasionalisme adalah kesetiaan, yang muncul karena adanya kesadaran akan identitas kolektif yang berbeda dengan lainnya. Pada kebanyakan kasus kesetiaan itu terjadi karena kesamaan keturunan, kebudayaan, bahasa. Akan tetapi semua unsur bukanlah unsur yang substansial, sebab yang ada dalam nasionalisme. Sedangkan cita-cita nasionalisme menurut Hertz ada empat macam: Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan dalam politik, ekonomi, keagamaan,

kebudayaan, dan persekutuan serta solidaritas. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari penguasa asing atau campur tangan dari dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang bersifat anti nasional atau yang hendak mengesampingkan bangsa dan Negara. Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (*separateness*), pembedaan (*distinctiveness*), individualitas dan keaslian (*originality*). Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan diantara bangsa-bangsa yang memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh.

Nasionalisme inklusif berbasis Pancasila memiliki karakter khas yang membedakannya dari bentuk nasionalisme eksklusif di negara lain. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang mampu mengakomodasi pluralitas masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang adaptif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan jati diri bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki keistimewaan dalam merespons pluralitas. Berbeda dengan ideologi-ideologi besar dunia yang cenderung seragam dan eksklusif, Pancasila dibangun dari nilai-nilai yang digali langsung dari realitas kemajemukan Indonesia. Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang khas dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, etnis, dan agama yang sangat kaya. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara berperan krusial dalam memelihara kesatuan dan keragaman. Sejak diresmikan sebagai dasar negara pada tahun 1945, Pancasila telah diakui sebagai pedoman moral dan ideologis yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan untuk menjembatani perbedaan dan mempersatukan berbagai kelompok dalam satu kesatuan yang harmonis.

Konsep inklusivitas dalam nasionalisme Indonesia juga berakar pada sejarah perjuangan bangsa yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama. Nasionalisme Indonesia tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari kesepakatan bersama untuk hidup dalam satu kesatuan politik yang disebut Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, nasionalisme Indonesia bersifat inklusif dan integratif. Pancasila sebagai sumber nilai nasionalisme memiliki peran strategis dalam membentuk sikap toleransi dan solidaritas sosial. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong penghormatan terhadap hak-hak setiap individu tanpa memandang latar belakangnya. Sementara itu, sila persatuan Indonesia menjadi perekat utama dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Nasionalisme inklusif juga berkaitan erat dengan pembentukan identitas nasional yang dinamis. Identitas nasional tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dalam hal ini, nasionalisme inklusif memungkinkan masyarakat untuk tetap terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia (Aminuddin and Nasution, 2024).

Pancasila pada hakekatnya adalah sistem nilai yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan Kebudayaan bangsa Indonesia, yang berasal dari unsur-unsur Kebudayaan secara keseluruhan, dan terpadu menjadi Kebudayaan bangsa Indonesia. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan tentang asal usul Pancasila. Walaupun banyak perbedaan pendapat soal asal usul Pancasila, tetapi meskipun berbeda tetap mempunyai kedudukan yang sama. Asal mula Pancasila dibedakan menjadi 2, yaitu asal mula langsung dan juga tidak langsung. Asal mula langsung mencakup pembahasan-pembahasan dari menjelang dan sampai sesudah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang menunjukkan aspek langsung Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan asal mula tidak langsung lebih menunjukkan sebelum pada aspek bahan dalam sejarah dimasa lampau, khususnya pada masa sebelum Kemerdekaan (Luh Putu Swandewi Antari, 2020).

Multikulturalisme di Indonesia seharusnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, harus menjadi dasar dalam menerima pluralitas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Multikulturalisme dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, namun juga berpotensi menyebabkan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Sifat egosentrisme yang mengatasnamakan agama atau suku dapat menimbulkan eksklusivisme dan konflik. Menjadikan multikulturalisme sebagai kekuatan Indonesia adalah tantangan yang memerlukan sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk menghindari dampak negatif. Misalnya, isu-isu seperti intoleransi, ketidakadilan sosial, dan polarisasi politik dapat mengancam persatuan. Penting untuk menilai bagaimana nilai-nilai Pancasila diadaptasi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dan bagaimana strategi dapat diperkuat untuk mempromosikan inklusi.

Pancasila dalam perspektif multikulturalisme dalam menjaga kesatuan dan keragaman. Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, memiliki lima sila yang masing-masing menyampaikan nilai-nilai fundamental: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini dirancang untuk mencerminkan dan mendukung kesatuan bangsa yang multikultural, menyediakan kerangka kerja untuk menghormati perbedaan sambil memperkuat persatuan. Penguatan nasionalisme inklusif juga penting dalam menghadapi era digital yang ditandai dengan penyebaran informasi yang cepat dan masif. Media sosial sering kali menjadi ruang yang rentan terhadap konflik identitas. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu diinternalisasikan agar masyarakat mampu menyaring informasi secara bijak. Dengan pendekatan yang humanis, nasionalisme inklusif tidak hanya menekankan pada loyalitas

terhadap negara, tetapi juga pada empati dan solidaritas antarsesama. Hal ini menjadikan nasionalisme sebagai kekuatan moral yang mampu membangun masyarakat yang harmonis. Nasionalisme inklusif berbasis Pancasila pada akhirnya merupakan bentuk nasionalisme yang relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara multikultural. Pendekatan ini tidak hanya menjaga persatuan, tetapi juga memperkaya identitas bangsa melalui keberagaman yang dimiliki.

Konsep Nasionalisme Inklusif berbasis Pancasila menekankan nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan yang menjadi dasar untuk merangkul keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Pancasila berperan sebagai norma fundamental negara sekaligus sistem budaya yang mengedepankan kehidupan inklusif dan komitmen kebangsaan dalam konteks globalisasi. Sejarah nasional Indonesia, seperti perjuangan kemerdekaan dan Sumpah Pemuda, menunjukkan praktik nasionalisme inklusif yang memperkuat persatuan di tengah keberagaman melalui peran tokoh dan peristiwa penting yang juga tercermin dalam buku pelajaran sejarah yang mengandung nilai-nilai multikulturalisme. Dalam menghadapi tantangan modern seperti konflik identitas, intoleransi, dan pengaruh globalisasi, internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan formal dan nonformal menjadi strategi utama untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat karakter kebangsaan generasi muda. Pendidikan multikultural berbasis Pancasila terbukti efektif dalam membangun sikap toleransi dan kesadaran akan keberagaman sejak dini, serta mendukung dialog antar kelompok masyarakat untuk mencegah disintegrasi bangsa. Secara keseluruhan, nasionalisme inklusif yang berakar pada Pancasila menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan Indonesia di tengah dinamika multikulturalisme kontemporer.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jangkauan literatur yang digunakan masih terbatas pada perspektif arus utama mengenai nasionalisme inklusif berbasis Pancasila, khususnya yang berasal dari tradisi keilmuan ilmu politik dan pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Perspektif kritis dari luar arus utama, seperti kajian postkolonial, suara komunitas adat, atau pandangan kelompok minoritas yang mengalami nasionalisme inklusif secara berbeda dari wacana dominan, belum terepresentasikan secara proporsional. Kedua, penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan konseptual dan historis sehingga belum didukung oleh data empiris lapangan yang dapat menggambarkan implementasi nasionalisme inklusif dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Terdapat kesenjangan antara konstruk konseptual yang ditawarkan dengan realitas implementasi di tingkat kebijakan maupun masyarakat sipil. Ketiga, pembahasan sejarah nasional Indonesia dalam penelitian ini masih bersifat umum dan belum mengkaji secara mendalam dinamika nasionalisme di setiap daerah atau kelompok etnis yang memiliki

karakteristik budaya berbeda. Keempat, penelusuran literatur dibatasi pada sumber berbahasa Indonesia dan Inggris, sehingga kontribusi ilmiah dalam bahasa lain atau literatur komparatif dari negara-negara dengan pengalaman serupa belum terserap secara optimal. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan secara menyeluruh kompleksitas tantangan multikulturalisme di Indonesia, dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris maupun komparatif.

Relevansi Sejarah Nasional Indonesia dalam Membentuk Nasionalisme Inklusif

Sejarah nasional Indonesia bukan sekadar rangkaian peristiwa masa lalu, melainkan ruang refleksi kolektif yang membentuk kesadaran kebangsaan. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, sejarah berperan sebagai fondasi penting dalam menumbuhkan nasionalisme inklusif sebuah bentuk nasionalisme yang tidak meniadakan perbedaan, tetapi merangkulnya sebagai kekuatan persatuan. Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan energi yang menyatukan. Narasi sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak dimonopoli oleh satu kelompok tertentu. Berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial turut berkontribusi dalam melawan kolonialisme. Fakta historis ini memperkuat gagasan bahwa identitas nasional Indonesia dibangun atas dasar inklusivitas sejak awal Nasionalisme yang lahir dari pengalaman bersama ini bersifat kolektif dan tidak eksklusif.

Momentum seperti Sumpah Pemuda 1928 menjadi simbol penting dalam pembentukan nasionalisme inklusif. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia menunjukkan adanya kesadaran untuk melampaui identitas primordial. Peristiwa ini tidak menghapus keberagaman, tetapi menyatukannya dalam visi kebangsaan yang lebih besar. Nilai ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan disintegrasi di era modern. Sejarah juga menunjukkan bahwa keberagaman sering kali menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan nasional. Dalam masa revolusi kemerdekaan, solidaritas lintas kelompok menjadi faktor utama dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini memperlihatkan bahwa nasionalisme inklusif memiliki basis historis yang kuat dalam pengalaman bangsa Indonesia (Hadi, Sulastri, and Suharno 2025).

Sejarah nasional juga berfungsi sebagai media pembelajaran nilai-nilai toleransi dan solidaritas. Melalui pemahaman terhadap perjuangan bersama, masyarakat dapat belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru, keberagaman menjadi dasar untuk membangun kerja sama dan persatuan yang lebih kuat. Dalam dunia pendidikan, sejarah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik. Pembelajaran sejarah yang kontekstual dan kritis mampu menumbuhkan kesadaran kebangsaan serta rasa cinta tanah air yang mendalam. Pendidikan sejarah tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan Penggunaan media digital dan narasi interaktif dalam pembelajaran sejarah dapat

meningkatkan minat generasi muda. Dengan cara ini, sejarah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang membosankan, tetapi sebagai sumber inspirasi dalam membangun masa depan bangsa. Selain itu, sejarah nasional juga memberikan pelajaran tentang pentingnya persatuan dalam menghadapi konflik. Berbagai peristiwa konflik di masa lalu menunjukkan bahwa perpecahan hanya akan melemahkan bangsa. Sebaliknya, persatuan dalam keberagaman menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan negara.

Nasionalisme inklusif yang berbasis pada sejarah juga mendorong penghargaan terhadap kontribusi berbagai kelompok dalam pembangunan bangsa. Setiap kelompok memiliki peran yang sama pentingnya dalam sejarah Indonesia. Pengakuan terhadap kontribusi ini menjadi dasar dalam membangun rasa keadilan dan kebersamaan. Dalam konteks sosial, sejarah berperan sebagai alat untuk membangun identitas kolektif yang inklusif. Identitas ini tidak bersifat homogen, tetapi terbentuk dari interaksi berbagai budaya yang saling memengaruhi. Hal ini menjadikan nasionalisme Indonesia bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Di era digital, tantangan terhadap pemahaman sejarah semakin kompleks. Informasi yang tidak akurat atau manipulatif dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sejarah. Oleh karena itu, literasi sejarah menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memahami sejarah secara kritis dan objektif.

Relevansi sejarah nasional Indonesia dalam membentuk nasionalisme inklusif sangat penting karena sejarah bersama perjuangan melawan kolonialisme dan proses terbentuknya bangsa menjadi fondasi etis dan sejarah bagi kesadaran kebangsaan yang inklusif. Nasionalisme Indonesia lahir dari solidaritas berbagai kelompok etnis dan agama yang secara sadar memutuskan untuk bersatu sebagai satu bangsa, sehingga nasionalisme ini harus terus dikembangkan secara sistemik agar tidak tergerus oleh sentralisme atau primordialisme berbasis agama atau suku tertentu (Widjaja, 2021). Pendidikan sejarah berperan besar dalam membentuk sikap nasionalisme inklusif dengan menanamkan nilai-nilai persatuan dan kebanggaan terhadap perjuangan kemerdekaan, meskipun ada kecenderungan narasi sejarah yang dipengaruhi ideologi tertentu sehingga perlu pendekatan pedagogis yang mendorong refleksi kritis dan pemahaman pluralistik. Studi juga menunjukkan bahwa pemahaman sejarah yang baik dilestarikan secara positif dengan sikap nasionalisme di kalangan pelajar, menekankan pentingnya pendidikan sejarah dalam membangun wawasan kebangsaan yang inklusif. Selain itu, pengalaman sosial di institusi seperti sekolah teologi di Yogyakarta menampilkan bagaimana praktik sosial berulang dapat membentuk karakter nasionalisme inklusif yang menghargai keberagaman budaya dan agama. Secara keseluruhan, pengkajian ulang sejarah nasional secara terbuka dan kritis diperlukan untuk memperkuat identitas nasional yang inklusif dan mengatasi tantangan eksklusivitas dalam konteks Indonesia modern.

Peran Nasionalisme Inklusif dalam Menjawab Tantangan Multikulturalisme di Era Modern

Era reformasi membuka ruang demokratisasi yang luas, namun juga memunculkan ekspresi-ekspresi identitas yang berpotensi eksklusif. Permasalahan mengenai ketahanan ideologi Pancasila saat ini menjadi polemik bangsa Indonesia. Munculnya berbagai isu gerakan pembentukan negara berbasis agama sampai dengan praktik-praktik pemahaman dan perubahan ideologi di berbagai aspek kehidupan sikap intoleransi terhadap umat beragama salah satunya adalah pemahaman agama yang bersifat eksklusif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti mampu mengayomi berbagai macam perbedaan yang ada dalam masyarakat. Namun, aksi intoleransi yang marak terjadi setelah Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mempertahankan Pancasila.

Globalisasi membawa dampak ganda terhadap nasionalisme inklusif. Di satu sisi, arus informasi global dapat memperkuat wawasan toleransi; di sisi lain, infiltrasi ideologi asing yang eksklusif mengancam kohesi sosial. Globalisasi memunculkan disorientasi nilai, krisis identitas, serta ketimpangan sosial yang berpotensi melemahkan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Globalisasi menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin tenggelam dan dilupakan, sementara di sisi lain hanya dengan pengimplementasian nilai Pancasila, krisis moralitas bangsa yang disebabkan oleh globalisasi dapat diatasi. Nasionalisme inklusif yang berakar pada sejarah tidak hanya berorientasi pada masa lalu, tetapi juga pada masa depan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan global. Dengan memahami sejarah, masyarakat dapat membangun identitas nasional yang kuat dan adaptif.

a. Multikulturalisme Indonesia dan Tantangan Kontemporer

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman tertinggi di dunia, terdiri dari 1.340 suku bangsa, sekitar 300 kelompok etnis yang memiliki sedikitnya 1.211 bahasa dan tersebar di 16.056 pulau. Keberagaman yang luar biasa ini menjadikan Indonesia sebagai laboratorium hidup multikulturalisme. Namun di balik kekayaan tersebut, berbagai tantangan kontemporer terus menghadang. Salah satu tantangan paling besar adalah radikalisme dan intoleransi yang timbul di masyarakat, di mana ketidakpuasan terkait kondisi sosial dan ekonomi sering kali memicu timbulnya ekstremisme yang mengancam persatuan. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi menjadi tantangan signifikan lainnya, karena perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang yang tidak merata dapat menciptakan kesenjangan di antara kelompok masyarakat. Di tingkat yang lebih dalam, politik identitas juga menjadi tantangan dalam integrasi nasional. Dalam beberapa situasi, beberapa kelompok lebih

memilih untuk mempertahankan identitas mereka daripada berkompromi dengan identitas nasional, dan ini dapat memicu fragmentasi sosial yang menghalangi upaya menciptakan persatuan. Tantangan ini diperparah oleh arus globalisasi yang membawa perubahan drastis pada tatanan sosial-budaya masyarakat Indonesia. Ancaman dari luar berasal dari pengaruh negatif globalisasi seperti gaya hidup konsumtif, hedonisme, individualisme, westernisasi, semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, serta semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan-tantangan ini menegaskan perlunya sebuah paradigma nasionalisme yang tidak eksklusif dan tidak pula kehilangan akar kulturalnya, melainkan nasionalisme yang secara aktif merangkul perbedaan sebagai kekuatan, bukan ancaman (Sutaman et al., 2017; Fadli, 2017).

b. Konflik Identitas dan Intoleransi sebagai Ancaman Nyata

Konflik identitas dan intoleransi bukan sekadar ancaman teoretis, melainkan telah berulang kali termanifestasi dalam sejarah modern Indonesia. Contoh nyata konflik berbasis agama dan etnis adalah tragedi Ambon (1999), konflik Sampit (2001), dan konflik Poso (1998-2001), yang semuanya menunjukkan bahwa keberagaman yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memicu konflik sosial. Secara lebih terperinci, primordialisme yang berlebih menjadi pemicu konflik antar umat beragama yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, dan membakar rumah ibadah. Berdasarkan hasil siaran pers SETARA Institute (2020), dalam rentang waktu November 2014 - Oktober 2019 telah terjadi 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 1.060 tindakan, di mana Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan angka pelanggaran di atas 100 peristiwa. Di sisi lain, globalisasi digital telah memperburuk konflik identitas melalui penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial. Banyak budaya asing masuk dan berkembang di kalangan masyarakat terutama pada generasi muda, dan hal itu mengancam serta membahayakan identitas nasional jika tidak terkendali. Krisis identitas nasional dapat terjadi khususnya pada generasi muda yang sangat mudah terpengaruh dengan arus globalisasi. Kondisi ini menciptakan kerentanan tersendiri karena generasi muda yang kehilangan jati diri kebangsaannya akan lebih rentan dipengaruhi oleh narasi-narasi ekstremis dan primordialisme sempit. Oleh karena itu, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah; ia adalah ideologi dan dasar negara yang memiliki nilai yang digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga sikap toleransi harus ditegakkan untuk melawan sikap anti-toleransi atau intoleransi yang semakin berkembang. Ini menegaskan bahwa pengabaian terhadap nilai-nilai kebangsaan bukan hanya persoalan identitas, melainkan ancaman eksistensial bagi keutuhan NKRI (Wibowo, 2020; Budiman, 2017).

c. Nasionalisme Inklusif sebagai Paradigma Alternatif

Dalam merespons berbagai tantangan di atas, nasionalisme inklusif hadir sebagai paradigma yang relevan dan strategis. Nasionalisme Indonesia tidak sama dengan nasionalisme sempit yang bersifat chauvinis, etnosentris, atau primordial. Nasionalisme Indonesia bersifat inklusif, toleran, dan multikultural, mengakui dan menghormati keragaman suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik yang ada di dalam bangsa. Konsep ini berakar pada gagasan para pendiri bangsa, terutama Soekarno, yang sejak awal merumuskan Pancasila sebagai landasan filosofis negara yang majemuk. Kebangsaan yang dimaksud Soekarno bukanlah chauvinisme khas Hitler; maka prinsip kedua untuk menjaganya adalah perikemanusiaan (internasionalisme), agar bangsa Indonesia merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Dalam perspektif kontemporer, nasionalisme inklusif hadir dimaksudkan untuk mewujudkan toleransi dan perdamaian bagi kelangsungan hidup dan pembangunan bangsa Indonesia. Nasionalisme inklusif merupakan potret penghayatan secara mendalam terhadap akar permasalahan yang dihadapi oleh bangsa, dan secara ideal terurai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih jauh, Pancasila sebagai landasan bagi nasionalisme yang inklusif diharapkan tidak terjebak pada kepentingan sektoral dan jangka pendek sebagai akibat motif kekuasaan rezim semata. Sebaliknya, perwujudan dari Pancasila harus mampu menaungi, melindungi, dan sekaligus mengelola berbagai perbedaan yang ada di tengah masyarakat sebagai kekayaan sumber daya negara. Paradigma nasionalisme inklusif ini dengan demikian menempatkan keberagaman bukan sebagai beban, melainkan sebagai modal sosial yang harus dikelola secara bijaksana melalui dialog, pendidikan, dan komitmen bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan (Asshiddiqie, 2005; Kymlica, 2004).

d. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Fondasi Harmoni Multikultural

Pancasila bukan sekadar simbol formal kenegaraan, melainkan merupakan sistem nilai yang secara inheren mampu menjawab tantangan multikulturalisme. Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan keragaman di tengah masyarakat yang multikultural. Pancasila tidak hanya menjadi alat pemersatu, tetapi juga sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan harmoni sosial, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, Pancasila tetap efektif dalam memfasilitasi dialog antar budaya dan memperkuat identitas nasional yang inklusif. Dalam praktiknya, kota-kota seperti Medan dan Surabaya membuktikan bahwa multikulturalisme dapat dikelola dengan baik. Pemerintah Kota Medan secara aktif melibatkan pemuda lintas etnis dalam kegiatan kerukunan, seperti festival budaya dan seminar toleransi, sehingga suku Batak, Minang, Jawa, Tionghoa, dan masyarakat lainnya berhasil hidup berdampingan melalui pendekatan pendidikan multikultural dan program dialog

antaretnis. Di ranah pendidikan, pendidikan Pancasila di era multikulturalisme memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, membentuk kepribadian individu yang berintegritas. Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural juga menekankan dan memperluas apa yang harus dilakukan, serta meningkatkan pemahaman dan implementasi persatuan. Selain itu, rejuvenasi Pancasila harus pula ditempatkan dalam perspektif multikulturalisme, yang bisa disosialisasikan dan ditanamkan melalui lembaga-lembaga pendidikan dengan pendidikan multikultural. Semua ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, jika diimplementasikan secara konsisten dan kontekstual, memiliki kapasitas besar untuk menjadi perekat sosial yang melampaui batas-batas primordial suku, agama, ras, dan antargolongan (Abdusshomad, 2024; Shofa, 2016).

e. Pengalaman Sejarah Nasional sebagai Inspirasi Persatuan di Era Modern

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia menyimpan pelajaran berharga tentang bagaimana perbedaan dapat dilampaui demi tujuan bersama yang lebih besar. Penguatan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika dapat mencegah radikalisme pada generasi milenial melalui lima langkah utama: mengembangkan budaya dan pemikiran multikulturalistik serta pluralistik yang berakar pada konsep negara bangsa yang majemuk; memperkuat konsensus universal antar umat seagama maupun antar umat beragama; mengangkat budaya lokal yang memberikan keteladanan atas keberagaman; mendorong penanaman nilai Bhinneka Tunggal Ika melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; serta memperkuat identitas nasional. Momentum Sumpah Pemuda 1928 merupakan contoh historis paling kuat tentang nasionalisme inklusif dalam aksi nyata. Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa para pemuda dan pemudi Indonesia pada tahun 1928 telah memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya persatuan dan kebhinekaan dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka menyadari bahwa meskipun berasal dari berbagai daerah, suku, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda, mereka tetap memiliki tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama. Lebih jauh, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sendiri mengandung kedalaman sejarah yang melampaui abad ke-20, sebab hidup berdampingan dalam kemajemukan dan keberagaman telah inheren mewarnai sejarah panjang bangsa Indonesia bahkan hingga masa Kerajaan Majapahit dan banyak kerajaan lain sebelumnya. Pengalaman sejarah ini menegaskan bahwa persatuan dalam keberagaman bukanlah konsep asing bagi bangsa Indonesia, melainkan warisan leluhur yang harus direvitalisasi. Dengan demikian, penguatan identitas nasional memerlukan pendekatan inklusif, pendidikan multikultural, pemerataan sosial ekonomi, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam membangun dialog antarbudaya; sebaliknya, ketimpangan dan intoleransi menjadi pemicu utama kegagalan multikulturalisme. Kesimpulannya, nasionalisme inklusif yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan diilhami oleh pengalaman sejarah perjuangan bangsa merupakan jawaban paling

autentik atas tantangan multikulturalisme Indonesia di era modern (Santoso et al., 2023; Maulana & Danugroho, 2023).

SIMPULAN

Nasionalisme inklusif berbasis Pancasila merupakan konsep strategis yang mampu menjawab kompleksitas keberagaman Indonesia sekaligus memperkuat kohesi sosial dalam menghadapi tantangan multikulturalisme modern. Kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan sebagai dasar ideologis, tetapi juga adaptif dalam merespons dinamika globalisasi, konflik identitas, serta perkembangan teknologi informasi. Sejarah nasional Indonesia memperlihatkan bahwa semangat inklusivitas telah menjadi fondasi utama dalam pembentukan identitas bangsa, terutama melalui pengalaman kolektif perjuangan kemerdekaan dan komitmen persatuan dalam keberagaman.

Keterkaitan antara nilai historis dan nilai ideologis memperkuat pentingnya membangun nasionalisme yang tidak eksklusif, melainkan mampu merangkul perbedaan sebagai kekuatan bersama. Peran pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan yang kritis, kontekstual, dan berbasis multikultural. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi bagi pendidik PPKn di sekolah. Pertama, guru PPKn dapat merancang pembelajaran berbasis studi kasus peristiwa sejarah lokal dan nasional yang menampilkan praktik nyata inklusivitas lintas kelompok, seperti Sumpah Pemuda atau perjuangan kemerdekaan multietnis, sehingga peserta didik memahami nasionalisme inklusif bukan sebagai konsep abstrak melainkan sebagai warisan hidup. Kedua, pendidik perlu memfasilitasi diskusi kelas yang mendorong peserta didik menganalisis isu-isu kontemporer seperti konflik identitas dan intoleransi melalui lensa nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar menghafal sila-silanya. Ketiga, guru PPKn dapat mengintegrasikan kegiatan lintas budaya di sekolah, seperti pertukaran cerita tradisi antarsiswa dari berbagai latar belakang etnis dan agama, sebagai wujud penguatan karakter kebangsaan yang konkret. Upaya ini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kesadaran kebangsaan yang mendalam, kritis, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Pengembangan penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai implementasi nasionalisme inklusif dalam berbagai konteks sosial dan pendidikan, termasuk pengembangan model pembelajaran PPKn berbasis multikulturalisme yang terukur efektivitasnya. Penerapan lebih lanjut juga dapat difokuskan pada perumusan kebijakan kurikulum dan model pendidikan multikultural yang tepat guna memperkuat toleransi, keadilan sosial, dan persatuan bangsa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, and Ridha Nida Neilofer Nasution. (2025). Nasionalisme Inklusif Dan Penguatan Identitas Indonesia. *Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4(1): 49–50.
- Anwar, R. (2021). *Nasionalisme Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadi, A.S, S Sulastri, and S Suharno. (2025). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penguatan Nasionalisme Pada Dinamika Bangsa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*.
- Hidayat, M. (2024). Multikulturalisme Dan Tantangan Integrasi Sosial Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(1): 45–58.
- Kusuma, A. (2022). Pancasila Dan Identitas Nasional Di Era Globalisasi. 7(2): 112–25. doi:<https://doi.org/10.5678/jpk.v7i2.2022>.
- Latif, Y. (2022). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1): 33–41.
- Prabowo, D. (2023). Keadilan Sosial Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 8(2): 89–102.
- Rahmawati, L. (2022). Nilai-Nilai Sejarah Nasional Dalam Pembentukan Karakter Bangsa. *Jurnal Sejarah dan Budaya* 10(1): 60–72.
- Sugama, F, Y. Rahmad Az, M. R., M Ridwan, F Rozi, A Azis, and J Jum'ah,. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3): 306–16. doi:<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>.
- Sutrisno, E, and A Prasetyo,. (2023). Globalisasi Dan Tantangan Nasionalisme Di Indonesia. *Jurnal Kajian Global* 5(2): 77–90.
- Wibowo, H, and B Santoso. 2025. “Polarisasi Sosial Dan Ketahanan Nasional.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 11(1): 15–29.
- Widjaja, P. (2021). Harmonisasi Masyarakat Plural: Praktik Sosial Di Sekolah Teologi Untuk Membangun Nasionalisme Indonesia Yang Inklusif. *KURIOS*. doi:<https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.359>.